

PENGARUH KURIKULUM DI JEPANG DAN DI INDONESIA TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN

Ratna Putri Widjayanti¹, Hitta Alfi Muhimmah², Nurul Istiqfaroh³

^{1,2,3}PGSD FIP Universitas Negeri Surabaya

¹ratnaputri.23038@mhs.unesa.ac.id, ²hittamuhimmah@unesa.ac.id,

³nurulistiqfaroh@unesa.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the Influence of the curriculum in Japan and Indonesia on the quality of education, by looking at the advantages and disadvantages of each. The educational Curriculum in Japan is known to be superior with its systematic and structured approach, paying attention to affective, cognitive and psychomotor aspects, emphasizing discipline, work ethics, manners, etiquette and instilling normative values from an early age and deep understanding of the subject matter. The advantages of this system are the high academic achievement of Japanese students and the formation of strong characters in terms of responsibility and independence. However, disadvantages include high academic pressure and a lack of student creativity due to a highly standardized approach. On the other hand, the educational curriculum in Indonesia shows greater flexibility and diversity, allowing for local adaptation and the application of various teaching methods. The advantages of this system include the development of social skills and cultural diversity, as well as the potential for educational innovation. However, the challenges faced include a lack of consistency and standardization, disparities in the quality of education between regions, this is due to unequal distribution of access to educational facilities and infrastructure as well as the lack of availability of skilled teaching staff. Through this comparison, this article provides insight into how the strengths and weaknesses of each education system can complement each other, offering potential improvements to improve the quality of education in both countries.

Keywords: Education Curriculum, Curriculum Comparison, Education System.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kurikulum di Jepang dan di Indonesia terhadap kualitas pendidikan, dengan melihat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kurikulum pendidikan di Jepang dikenal unggul dengan pendekatannya yang sistematis dan terstruktur, memperhatikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik, menekankan pada kedisiplinan, etika kerja, sopan santun, tata krama dan menanamkan nilai-nilai norma sejak dini serta pemahaman yang mendalam terhadap materi pelajaran. Kelebihan dari sistem ini adalah tingginya pencapaian akademik siswa Jepang serta terbentuknya karakter yang kuat dalam hal tanggung jawab dan kemandirian. Namun kekurangannya meliputi tekanan akademik yang tinggi dan kurangnya kreativitas siswa akibat pendekatan yang sangat terstandarisasi. Di sisi lain, kurikulum pendidikan di Indonesia menunjukkan fleksibilitas dan keberagaman yang lebih besar, memungkinkan adaptasi lokal dan penerapan berbagai metode pengajaran. Kelebihan dari sistem ini termasuk pengembangan kemampuan sosial dan keberagaman budaya, serta

potensi untuk inovasi pendidikan. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya konsistensi dan standarisasi, disparitas kualitas pendidikan antar wilayah hal ini dikarenakan pemerataan akses pendidikan yang kurang merata, fasilitas pendidikan dan infrastruktur serta kurangnya ketersediaan tenaga pengajar yang ahli. Melalui perbandingan ini, artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem pendidikan dapat saling melengkapi, menawarkan potensi perbaikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kedua negara tersebut.

Kata kunci: Kurikulum Pendidikan, Perbandingan Kurikulum, Sistem Pendidikan.

A. Pendahuluan

Salah satu faktor yang paling menentukan kemajuan suatu negara adalah kualitas sumber daya manusia. Karena sebaik dan sehebat apapun infrastruktur dalam negeri, jika sumber daya manusianya tidak berkompeten maka tidak akan bisa berkompetisi dalam persaingan global. Peningkatan sumber daya manusia tidak lepas dari pendidikan yang diperolehnya. Pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk masa depan sebuah bangsa. Kualitas sumber daya manusia suatu Negara dilihat dari kualitas pendidikan yang dimilikinya. Pendidikan memiliki posisi yang strategis untuk mengangkat kualitas, harkat, dan martabat setiap warga negara sebagai bangsa yang berharkat dan bermartabat. Pendidikan akan melahirkan orang-orang terdidik yang akan menjadi kekuatan untuk membentuk suatu organisasi besar sebuah Negara (Ridlwani et al., 2021). Sedangkan

menurut bapak pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara "Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya pada masa yang akan datang" (Afriliani, 2021). Dimana sistem pendidikan yang efektif menjadi kunci keberhasilan dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi tuntutan global. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Harefa, D., Telaumbanua, 2020) Terdapat tiga pokok pikiran utama yang terkandung

di dalam definisi tersebut di atas yaitu: (1) usaha sadar dan terencana; (2) mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya dan (3) memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Iyam Maryati, Yenny Suzana, Darmawan Harefa, 2022) Dalam mencapai kesempurnaan dalam hidup, harus dilalui dengan pendidikan. Lebih dari itu, semua sisi kehidupan pada manusia itu tidak lepas dari pendidikan. Dalam memajukan suatu pendidikan. Negara perlu membandingkan pendidikan dengan Negara lain, yang bertujuan untuk mengetahui persamaan maupun perbedaannya, kelebihan maupun kekurangannya, lalu mengambil unsur positifnya sekaligus untuk menyesuaikan dengan kondisi local (Rahmadani et al., 2023).

Bagaimanapun, kualitas pendidikan yang diberikan oleh suatu negara sangat dipengaruhi oleh kurikulum yang diterapkan dalam sistem pendidikannya. Kurikulum menjadi tulang punggung dari proses pembelajaran, menentukan arah dan

fokus dari apa yang diajarkan kepada generasi penerus.

Di tengah globalisasi dan persaingan yang semakin ketat dalam era digital ini, penting bagi negara-negara untuk terus mengevaluasi dan memperbarui kurikulum pendidikan agar relevan dengan tuntutan zaman. Negara perlu membandingkan pendidikan dengan negara lain, yang bertujuan untuk mengetahui persamaan maupun perbedaannya, kelebihan maupun kekurangannya, lalu mengambil unsur positifnya sekaligus untuk menyesuaikan dengan kondisi local (Rahmadani et al., 2023).

Dalam konteks ini, Jepang dan Indonesia merupakan dua negara yang menarik untuk dianalisis. Meskipun keduanya memiliki sejarah, budaya, dan sistem pendidikan yang berbeda, keduanya menghadapi tantangan serupa dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan mereka.

Dalam artikel ini, kami akan mengeksplorasi pengaruh kurikulum di Jepang dan Indonesia terhadap kualitas pendidikan, sambil menganalisis kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan membandingkan dan menganalisis pendekatan kedua

negara dalam merancang dan menerapkan kurikulum, kami berharap dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana kurikulum mempengaruhi kualitas pendidikan tingkat nasional. Dari sini diharapkan dapat ditemukan pelajaran berharga dan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

Jepang memiliki sistem pendidikan yang baik di dunia, ini dikarenakan Jepang sudah memiliki banyak fasilitas yang mendukung dan juga SDM yang mumpuni. Negara Jepang dijadikan patokan oleh negara berkembang sebagai kiblat untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Johan, 2018). Saat ini Indonesia merupakan negara yang memiliki kualitas pendidikan yang kurang baik menurut PISA tahun 2022 negara Indonesia saat ini berada pada peringkat 67 dari daftar 81 negara yang terdiri dari 37 negara Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan 44 negara mitra.

Untuk itu sistem pendidikan di Indonesia harus banyak belajar dari negara Jepang. Hal ini dikarenakan negara Jepang dari dulu hingga sekarang unggul dari segi teknologi dan juga dari segi pendidikannya, ini disebabkan negara Jepang

merupakan negara maju yang memiliki kualitas yang unggul (Johan, 2018). Selain itu di Negara Jepang, yang diajarkan di sekolah tidak hanya materi tentang materi pelajaran, tetapi juga tentang norma-norma yang berlaku, seperti sopan santun, kejujuran, empati, simpati (Conie Chairunnisa, Istayatiningtias et al. 2019). Di Negara Jepang kepribadian yang baik, disiplin, taat dengan peraturan tidak kalah penting dengan kepintaran yang diajarkan di dalam kelas (Zarman, 2017). Untuk anak usia 0-4 tahun, anak-anak di Jepang lebih diajarkan dengan tata krama, sopan santun, membangun kepribadian yang baik dan mengikuti nilai serta norma yang ada (Johan, 2018).

Negara Indonesia masih banyak orang tua dan guru yang menuntut peserta didik dari segi akademis saja dan tidak melihat proses dalam pencapaian tujuan belajar. Seharusnya yang harus dikembangkan dari peserta didik tidak hanya kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotoriknya. Pendidikan di Indonesia sangat penting adanya peningkatan dari segi sistem pendidikan baik dari kurikulum, kompetensi guru, dan juga fasilitas merata yang ada di Indonesia (Connie

Chairrunisa, Istayatiningtias et al. 2019).

B. Metode Penelitian

Artikel ini membicarakan tentang Pengaruh Kurikulum Jepang dan Indonesia terhadap Kualitas Pendidikan, jenis metode yang digunakan adalah literatur research dengan cara mengumpulkan teori-teori yang relevan, yang sama, dan linear dengan topik yang dibahas.

Analisis jurnal hasil literatur review ini menggunakan critical appraisal.

Critical appraisal adalah proses analisis jurnal yang digunakan menjadi dasar teori terkait perbedaan, persamaan, dan kekurangan.

Metode penelitian literatur review yang mana memberikan output terhadap data yang ada, serta penjabaran dari suatu penemuan sehingga dapat dijadikan contoh untuk kajian penelitian dalam menyusun atau membuat pembahasan yang jelas dari isi masalah yang akan diteliti. Penulis mencari data atau bahan literatur dari jurnal atau artikel dan juga referensi dari buku sehingga dapat dijadikan suatu landasan yang kuat dalam isi atau pembahasan. Adapun dari penelitian ini, terkait isi dengan penggunaan metode

penelitian sytematic literature review. Dalam penggunaan penelitian di ilmu matematika mencari dan mengumpulkan jurnal-jurnal serta diambil beberapa kesimpulan lalu ditelaah secara mendalam melalui cara yang rinci agar terdapat suatu hasil akhir yang baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Kurikulum Pendidikan Jepang

Kurikulum pendidikan di Jepang ditentukan oleh menteri pendidikan yang kemudian dikembangkan oleh dewan pendidikan distrik dan kota praja. Kurikulum awal tahun 1980 memuat mata pelajaran untuk SD terdiri dari Bahasa Jepang sebagai bahasa pengantar, ilmu sosial, berhitung, ilmu pengetahuan umum, musik/seni dan kerajinan, pendidikan jasmani dan kerumah tanggaan (grade 4 dan 6), di samping itu pendidikan moral wajib belajar 9 tahun, khusus perbaikan kurikulum dilakukan setiap 10 tahun sekali.

Di Jepang kurikulum disusun oleh sebuah komite khusus di bawah kontrol Kementerian Pendidikan (MEXT). Komisi kurikulum terdiri dari wakil Teacher Union, praktisi dan pakar pendidikan, wakil dari kalangan industri, dan wakil MEXT. Komisi ini

bertugas mempelajari tujuan pendidikan Jepang yang terdapat dalam Fundamental Education Law (Kyouiku Kihonhou), lalu menyesuaikannya dengan perkembangan yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri. Namun, karena unsur politik sangat kental mewarnai wakil-wakil yang duduk dalam komisi ini maka tak jarang terjadi perdebatan panjang terutama antara wakil teacher union dan wakil kementerian dalam penyusunan draft kurikulum.

Pembaharuan kurikulum di Jepang berlangsung setiap 10 tahun sekali, dan kurikulum terbaru yang diterbitkan di tahun 1998 adalah pembaharuan ketujuh sejak kurikulum yang diterapkan pada Perang Dunia II. Kurikulum 1998 membawa angin baru dalam dunia pendidikan Jepang. Kurikulum ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya berdasarkan konsep yang dibawanya yaitu pendidikan yang berorientasi kepada pengembangan beragam personality siswa, bukan seperti sebelumnya yaitu common education, atau pendidikan yang sama untuk semua siswa. Guru-guru di Jepang sejak perang percaya bahwa pendidikan harus bersifat massal dan sama, bukan pendidikan yang menjurus

kepada keikhlasan tertentu atau menerapkan pola/metode yang lain daripada yang lain dianggap salah. Guru-guru Jepang senantiasa menjaga image bahwa semua siswa harus memiliki prestasi yang sama, kedisiplinan yang sama dengan sistem pendidikan yang sama. Namun adanya kurikulum baru menyadarkan mereka bahwa setiap anak punya potensi yang berbeda dengan lainnya, dan inilah yang harus dibina.

Kurikulum yang baru bersifat fleksibel dan memungkinkan sekolah untuk meramu kurikulum sendiri berdasarkan kondisi daerah, sekolah dan siswa yang mendaftar. Sebagai contoh, di SMP, selain mata pelajaran wajib, siswa juga ditawarkan dengan mapel pilihan.

Dengan adanya kurikulum baru ini, training besar-besaran dilakukan untuk mengubah pola pikir guru-guru Jepang. MEXT juga merevisi beberapa buku pelajaran, dan secara hampir bersamaan mengusulkan pemberlakuan 5 hari sekolah dan adanya jam khusus untuk pengembangan jiwa sosial siswa melalui integrateg course atau songoteki jikan.

Kurikulum di level sekolah disusun dengan kontrol penuh dari The Board of Education di Tingkat

Prefectur dan municipal (distrik). Karena kedua lembaga ini masih terkait erat dengan MEXT, maka pengembangan kurikulum Jepang masih sangat kental sifat sentralistiknya. Namun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Central Council for Education (Chuuou shingi kyouiku kai) pada tahun 1997 memungkinkan sekolah berperan lebih banyak dalam pengembangan kurikulum di masa mendatang.

Kurikulum di Jepang mengedepankan prinsip Chi-Toku-Tai (知-徳-体) yang pada dasarnya sama dengan tiga domain pengetahuan yang dikemukakan oleh Bloom (MEXT,2018). Chi (知) diartikan sebagai pengetahuan akademis yang kuat (solidacademic ability) yang memuat kompetensi untuk mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan, mengambil inisiatif sendiri untuk menemukan permasalahan, belajar dan berpikir, mengambil keputusan dengan independen, serta dapat dengan lebih baik memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Jadi, dari sini dapat dilihat bahwa pembelajaran di sekolah dasar di Jepang lebih mengedepankan kemandirian siswa untuk menggali pengetahuannya

sendiri dengan menemukan permasalahan sendiri di lingkungan dan dapat dengan mandiri mampu mengusulkan solusi atau tindakan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Kemudian Toku (徳), aspek sejalan dengan domain afektif dalam teori Bloom, yaitu aspek yang mengembangkan nilai, emosional, dan karakter siswa (Richness in mind). Dalam mewujudkan aspek ini, guru mengajarkan berbagai karakter di kelas dengan menjadikan mata pelajaran sebagai wadah menyampaikan nilai dan karakter. Dalam pembelajaran di kelas rendah, diterapkan mata pelajaran moral education dan living environment studies untuk membekali siswa tentang pentingnya nilai moral dan karakter, serta lingkungan sekitar yang menjadi sumber belajar utama siswa. Terdapat juga jam pelajaran yang secara khusus digunakan untuk jam makan siang dan bersih- bersih, kegiatan ini juga dapat memupuk karakter dan nilai moral siswa melalui interaksi dengan teman sebaya dan saling menghargai satu sama lain.

Lalu aspek Tai (体) , yang memiliki makna kanji yang sama dengan “fisik” atau “tubuh”. Dalam konteks pendidikan, yang dimaksud

dengan Tai di Jepang maknanya sama dengan domain psikomotorik yang dikemukakan oleh Bloom. Dalam publikasi pengenalan pendidikan dasar, MEXT (2018) menjelaskan bahwa Tai (体) adalah “Healthy body” atau tubuh yang sehat untuk dapat hidup dengan aktif. Aspek ini pada umumnya diaplikasikan dengan utama pada mata pelajaran physical education dan juga pada jam istirahat dimana siswa diperbolehkan untuk bermain dengan teman-temannya.

Dalam proses pembelajaran di kelas, Jepang pada umumnya menerapkan sistem lima hari sekolah dari hari Senin hingga hari Jumat. Jadwal pelajaran yang pada umumnya diterapkan seperti berikut (MEXT,2018) :

Untuk kegiatan di kelas selalu diawali dengan kegiatan membaca pagi dan belajar pagi sebelum memasuki jam pelajaran. Pada kelas rendah, terlihat belum ada mata pelajaran yang kompleks seperti sains ataupun pendidikan sosial dan lebih menekankan pada mata pelajaran bahasa dasar, aritmatika, musik, seni dan kerajinan, pendidikan moral, pendidikan fisik, dan bahasa Jepang. Dalam penyusunan jadwal pelajaran ini, semuanya diatur dalam kurikulum dan kebijakan yang diterbitkan oleh

menteri pendidikan, kebudayaan, dan olahraga (MEXT).

Dalam dokumen pengenalan MEXT (MEXT,2019), dijelaskan bahwa kurikulum di tingkat sekolah dasar di Jepang menekankan pada kompetensi untuk hidup (Ikiru Chikara/生きる力) yang dalam artian harfiah berarti kekuatan untuk hidup. Kementerian (MEXT) mengembangkan pendidikan di Jepang untuk meningkatkan semua kompetensi kehidupan siswa, berfokus pada keseimbangan menyeluruh antara kemampuan akademis, karakter yang baik (*richness in mind*), dan tubuh atau fisik yang sehat. Disamping itu, pendidikan di Jepang juga mengembangkan pola pikir global siswa dimana siswa diharapkan untuk dapat menjadi pemimpin di masyarakat pada masa depan yang akan datang.

Sama seperti negara Indonesia, Jepang juga secara terus menerus melakukan pembaharuan terhadap kurikulumnya. (Kitamura et al.,2018, p : 25). Secara khusus, kurikulum pendidikan primer dan sekunder (*primary and secondary*) atau setingkat dengan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, mengalami perubahan yang besar. Terdapat dua titik besar perubahan

Pendidikan di Jepang. Semasa era Meiji, terdapat perubahan besar pendidikan dimana dilakukannya kebijakan Restorasi Meiji yang membuka pintu Jepang kepada “dunia barat” untuk mengejar ketertinggalan dari berbagai sektor, termasuk pendidikan.

Sebelum dilakukannya Restorasi Meiji, pendidikan di Jepang sangatlah tertutup dan tertinggal dari bangsa barat. Pelajar-pelajar dan petugas kementerian pendidikan Jepang dikirimkan untuk mengamati pendidikan di negara barat, seperti Kanada, Perancis, Jerman, Belgia, dan Belanda. Kemudian delegasi Jepang tersebut mengambil nilai-nilai penting, seperti perbedaan yang terdapat pada pendidikan di setiap negara dengan Jepang, termasuk aspek kurikulum yang diterapkan pada setiap negara tersebut. Kebijakan ini merupakan cerminan praktik Pendidikan Komparatif yang diterapkan pada era Meiji (sekitar 1800 an) yang membuahkan hasil positif terhadap perkembangan pendidikan di Jepang terutama dengan Titik perubahan besar yang terjadi paling terkini adalah dari Ad Hoc untuk Pendidikan (Rinkyoshin) pada tahun 1984 (Kitamura et al.,2018, p: 27). Kebijakan ini

diciptakan atas dasar permasalahan besar yang terjadi pada sektor pendidikan pasca perang di era Showa. Permasalahan tersebut seperti kenakalan remaja, vandalisme, kebiasaan buruk siswa, dan kekerasan siswa terhadap guru yang sering terjadi secara nasional di Jepang.

Untuk mengatasi permasalahan besar ini, kurikulum di Jepang diperbaiki dan dibuat kebijakan yang disebut sebagai Rinkyoshin yang menekankan pada pendidikan yang ketat. Pada mulanya, kebijakan ini memberikan hasil yang memuaskan, tetapi timbul permasalahan besar lainnya dengan munculnya persaingan ketat dalam melanjutkan pendidikan. Siswa yang sudah lulus dari sekolah dasar akan menghadapi ujian masuk ke sekolah menengah awal seterusnya ke sekolah menengah tinggi dan kemudian di universitas. Setiap ujian masuk ini menimbulkan persaingan yang sangat ketat, terutama pada tingkat universitas, yang menimbulkan banyak kasus bunuh diri yang terjadi. Fenomena ini sering disebut sebagai Examination Hell di berbagai negara, seperti Korea Selatan dan Jepang sendiri.

Untuk mengatasi permasalahan ini, secara bertahap Jepang mulai

mengimplementasikan kurikulum yang lebih liberal kepada setiap jenjang pendidikan (Kitamura et al.,2018, p: 37). Hal ini juga dilakukan sekaligus untuk menghadapi tantangan era globalisasi yang mendorong masyarakat untuk memiliki kemampuan yang beragam agar dapat bertahan hidup di masyarakat. Sehingga mulai diterapkannya kurikulum yang menerapkan kompetensi Ikiru Chikara seperti yang sekarang ini diterapkan.

Masyarakat Jepang sendiri merupakan masyarakat yang terdiri dari berbagai kultur dan etnis. Hal ini dikarenakan faktor sejarah dimana banyak terjadi interaksi dengan bangsa luar yang menyebabkan beragamnya kultur di Jepang. Budaya modern Jepang juga menjadi daya tarik tersendiri bagi warga negara lain untuk mengunjungi Jepang atau bahkan tinggal di Jepang. Hal ini juga mempengaruhi pendidikan di Jepang dengan semakin besarnya tuntutan untuk siswa-siswa di Jepang agar dapat hidup di lingkungan yang multikultur (Kitamura et al.,2018, p : 177).

Dalam kurikulum dengan nilai Ikiru Chikara yang diterapkan di Jepang saat ini, siswa ditekankan untuk dapat dengan mandiri

mengenali nilai baik dirinya sendiri dan menghargai nilai yang dimiliki oleh orang lain, hal ini diyakini dapat menumbuhkan siswa sebagai bagian penting masyarakat yang membangun lingkungan masyarakat yang berkelanjutan (Sustainable Society) (MEXT 2019).

Oleh sebab itu Kurikulum Nasional (The New National Curriculum) yang mulai diterapkan di Jepang pada tingkat taman kanak-kanak pada tahun 2018, pada tingkat sekolah dasar pada tahun 2020, dan sekolah menengah rendah pada tahun 2021, memiliki tujuan untuk membangun kurikulum yang terbuka dengan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mendidik siswa agar dapat berkembang bersama masyarakat, sekaligus dengan dapat membangun masyarakat yang baik melalui pendidikan yang baik.

Kementerian pendidikan sudah menekankan pada kurikulum di Jepang untuk dapat mengimplementasikan pembelajaran yang aktif (Active Learning) pada setiap pembelajaran di semua jenjang pendidikan. MEXT berharap bahwa siswa dapat menerapkan apa yang dipelajarinya di sekolah pada lingkungan masyarakat dimana dia

tinggal, dan menjadi bagian penting di masyarakat ketika siswa tersebut sudah tumbuh. Dalam penerapan kurikulum di sekolah dasar, setiap sekolah sebenarnya diperkenankan untuk mendesain kurikulum berdasarkan kurikulum nasional yang sudah dibuat (MEXT, 2019). Hal ini dikarenakan karakteristik setiap daerah yang beragam. Seperti misalnya sekolah di Prefektur Tokyo dapat saja berbeda dengan Prefektur Osaka karena karakteristik yang berbeda antara wilayah Kanto (Tokyo) dan Kansai (Osaka). Untuk semua daerah ini, sudah diterapkan pembelajaran yang integratif yang mengedepankan pada aktivitas pemecahan masalah.

Siswa di Jepang pada umumnya berangkat ke sekolah pukul 08.00 pagi. Ketika sampai di sekolah, siswa menaruh tas dan alat belajar mereka di rak yang disediakan di belakang kelas. Siswa melakukan pertemuan pagi untuk menentukan tugas yang dilakukan oleh setiap siswa di kelas (Nicchoku). Kemudian, pembelajaran dimulai dengan pembelajaran Bahasa Jepang, diikuti dengan pendidikan moral. Pendidikan moral sendiri diterapkan melalui semua aktivitas pendidikan untuk mengembangkan sikap siswa untuk memikirkan

mengenai permasalahan moral yang dihadapi dan mendiskusikannya bersama teman-teman di kelasnya. Terdapat kegiatan bersih-bersih setelah siswa selesai makan bersama, hal ini dilakukan untuk dapat menumbuhkan rasa peduli siswa dan solidaritas siswa di kelas(文部科学省/mextchannel. 2019).

Selain melalui aktivitas pembelajaran, kurikulum di Jepang juga menekankan siswa untuk aktif dalam kegiatan diluar pembelajaran. Seperti aktivitas Student Council, ekstrakurikuler, dan aktivitas di masyarakat. Aktivitas Student Council sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan sendiri oleh siswa dimana ketua kegiatan pada umumnya adalah berasal dari siswa sendiri dan guru bertugas untuk membina. Dalam aktivitas ini, siswa dapat mengorganisir kegiatan-kegiatan di sekolah seperti membersihkan atau memperindah sekolah atau kelas, membuat program broadcasting, dan mengatur perpustakaan (MEXT, 2019). Jepang sendiri menekankan kepada setiap sekolah untuk mengembangkan pendidikan di sekolahnya dengan kolaborasi dengan masyarakat sekitar. Sekolah, keluarga, dan komunitas lokal menjadi sarana dan tempat belajar yang

penting bagi siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya berdasarkan konteks keunikan daerahnya sendiri (MEXT, 2019). Dengan begini, dapat diketahui bahwa sekolah di Jepang selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan keluarga siswa dan masyarakat untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif, integratif, dan mandiri kepada siswa.

Maka, dapat disimpulkan bahwa kurikulum di Jepang sendiri mengedepankan aspek Chi-Toku-Tai yang sejalan dengan konsep tiga domain yang dikemukakan oleh Bloom. Nilai penting dalam pembelajaran di Jepang adalah Ikiru Chikara yang mendidik siswa di Jepang untuk dapat hidup di lingkungan dan masyarakat, sekaligus mempersiapkan siswa untuk memiliki pola pikir global dan siap untuk menjadi pemimpin. Penerapan kurikulum di Jepang pada umumnya berakar pada kurikulum nasional, namun setiap sekolah diperbolehkan untuk mendesain kurikulum agar sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerahnya sendiri. Kebijakan-kebijakan pendidikan sangatlah sering dikeluarkan oleh MEXT untuk menghadapi tantangan

pendidikan di era global, salah satunya adalah untuk mengkolaborasikan sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk dapat menciptakan kondisi belajar yang memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif, mandiri, dan integratif. Dari kurikulum Jepang ini, dapat diperoleh rekomendasi bagi kurikulum di negara lain untuk dapat mengintegrasikan pembelajaran dalam suatu topik (tematik), membuat kolaborasi antara sekolah, orangtua, dan masyarakat, serta menaruh perhatian yang sama terhadap implementasi pendidikan yang menumbuhkan pengetahuan, sikap, dan keahlian.

Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika sekolah menyusun kurikulumnya: (1) Mengacu kepada standar kurikulum nasional, (2) Mengutamakan keharmonisan pertumbuhan jasmani dan rohani siswa, (3) Menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, (4) Memperhatikan step perkembangan siswa, (5) Memperhatikan karakteristik course pendidikan/jurusan pada level SMA.

Kurikulum di Indonesia

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20

Tahun 2003 menyatakan bahwa: "Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu". Kurikulum memiliki lima komponen utama, yaitu : (1) tujuan; (2) isi/materi; (3) metode atau strategi pencapaian tujuan pembelajaran; (4) organisasi kurikulum dan (5) evaluasi.

Seperti halnya dalam masalah sistem pendidikan secara makro, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta globalisasi turut mempengaruhi corak kurikulum pendidikan di Indonesia dari mulai periode awal, yakni masa kemerdekaan dan pemerintahan orde lama, orde baru, reformasi, hingga kurikulum 2022 yang baru saja diimplementasikan. Dari sekian banyak faktor, political will pemerintah dan paradig politiklah yang hingga kini dirasakan memberikan pengaruh paling kuat dalam perubahan-pengembangan, maupun penyempurnaan kurikulum dari masa ke masa. Tidak ada yang salah apabila terjadi perubahan kurikulum. Jangankan setiap sepuluh tahun sekali, setiap tahun sepuluh kali pun

tidak menjadi masalah, kalau memang dikehendaki demikian. Yang menjadi soal adalah dengan tujuan dan alasan apakah perubahan itu terjadi, dan apakah tujuan serta alasan itu memang dibenarkan dan dibutuhkan sekarang, sebagai antisipasi masa depan.

Dalam suatu sistem pendidikan kurikulum bersifat dinamis dan harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan sesuai dengan perkembangan serta tantangan zaman. Namun perubahan akan kurikulum harus dilakukan secara sistematis, terarah, dan tidak asal-asalan. Sejarah kurikulum di Indonesia tidak lepas dari pergantian pemerintahan sehingga ada ungkapan ganti menteri ganti kurikulum. Sejarah kurikulum mencatat Indonesia sudah mengalami perubahan kurikulum sebanyak 12 kali. Sejak kemerdekaan tahun 1945 kurikulum sudah mengalami perubahan di tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, 2020, dan 2022.

1) Kurikulum 1947 "Rentjana Pelajaran 1947"

Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda "leer plan" artinya rencana pelajaran, istilah

lebih populer dibanding “curriculum” (Bahasa Inggris). Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politik, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedang asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat ini dikenal dengan sebutan “Rentjana Pelajaran 1947”, yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok: (1) daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya; (2) garis-garis besar pengajaran. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rentjana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Rentjana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah: pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani.

2) Kurikulum 1952 “Rentjana Pelajaran Terurai 1952”

Setelah “Rentjana Pelajaran 1947”, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama “Rentjana Pelajaran Terurai 1952”. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran (Djauzak Ahmad, Dispendas periode 1991-1995).

3) Kurikulum 1964 “Rentjana Pendidikan 1964”

Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rentjana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD,

sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana⁴, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional/ artistik, keprigelan, dan jasmani. Ada yang menyebut Panca wardhana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan (keterampilan), dan jasmaniah. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis.

4) Kurikulum 1968

Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini tampak dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum

1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Mata pelajaran dikelompokkan menjadi 9 pokok. Djauzak menyebut Kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat. "Hanya memuat mata pelajaran pokok saja,". Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat.

5) Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO (management by objective) yang terkenal saat itu," Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), yang dikenal dengan istilah

"satuan pelajaran", yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi : tujuan instruksional umum (TIU), tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran.

6) Kurikulum 1984, "Kurikulum 1975 yang disempurnakan".

Kurikulum 1984 mengusung process skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut "Kurikulum 1975 yang disempurnakan". Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Learning (SAL). Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diujicobakan, mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di

ruang kelas lantaran siswa berdiskusi, di sana-sini ada tempelan gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Akhirnya penolakan CBSA bermunculan.

7) Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999

Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayang, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil. Sehingga banyak kritik berdatangan, disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998, diikuti kehadiran Suplemen Kurikulum 1999. Tapi perubahannya lebih pada menambal sejumlah materi pelajaran saja.

8) Kurikulum 2004, "KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi)"

Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004, yang disebut dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung tiga unsur pokok, yaitu: pemilihan kompetensi yang sesuai; spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi; dan pengembangan pembelajaran. KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut : Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Struktur kompetensi dasar KBK ini dirinci dalam komponen aspek, kelas dan semester. Keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata pelajaran, disusun dan dibagi menurut aspek dari mata pelajaran tersebut. Pernyataan hasil belajar ditetapkan untuk setiap aspek

rumpun pelajaran pada setiap level. Perumusan hasil belajar adalah untuk menjawab pertanyaan, “Apa yang harus siswa ketahui dan mampu lakukan sebagai hasil belajar mereka pada level ini?”. Hasil belajar mencerminkan keluasan, kedalaman, dan kompleksitas kurikulum dinyatakan dengan kata kerja yang dapat diukur dengan berbagai teknik penilaian. Setiap hasil belajar memiliki seperangkat indikator. Perumusan indikator adalah untuk menjawab pertanyaan, “Bagaimana kita mengetahui bahwa siswa telah mencapai hasil belajar yang diharapkan?”

9) Kurikulum 2006, “KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)”

Pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas, namun pada awal tahun 2006, uji terbatas tersebut dihentikan. Dan selanjutnya dengan terbitnya permen nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan permen nomor 23 tahun 2006 tentang standar kelulusan, lahirlah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada

jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan.

Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran, dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan dinas pendidikan daerah dan wilayah setempat.

10) Kurikulum 2013

Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diujicobakan pada tahun 2004 (curriculum based competency). Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan; pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah.

Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal, agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan konsep belajar tuntas dan pengembangan bakat. Setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing.7Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir

pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan.

11) Kurikulum Merdeka

Di tahun 2022 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim tepatnya pada tgl 11 Februari 2022 meluncurkan Kurikulum Merdeka secara daring. Sehingga pada tahun 2022-2023 pemerintah menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan penguatan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Adapun karakteristik dari kurikulum merdeka adalah pengembangan soft skill dan karakter, fokus pada materi esensial, dan pembelajaran yang fleksibel (Rohyadi et al., 2023). Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang jauh lebih ringkas, sederhana, fleksibel untuk

bisa mendukung learning loss recovery akibat pandemi Covid-19.

Kurikulum Merdeka juga untuk mengejar ketertinggalan Pendidikan Indonesia dari negara-negara lain. Dalam Kurikulum Merdeka (Kumer) ini tidak membatasi konsep pembelajaran yang berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah dan juga menuntut kekreatifan terhadap guru maupun peserta didik (Manalu et al., 2022).

Menurut Eko Risdianto (2019:4 dalam Manalu et al ., 2022) juga mengatakan bahwa kehadiran kurikulum merdeka belajar ini juga bertujuan untuk menjawab tantangan pendidikan di era revolusi industri 4.0 di mana dalam perwujudannya harus menunjang keterampilan dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif, inovatif, serta terampil dalam berkomunikasi dan berkolaborasi bagi peserta didik. Dan Kurikulum Merdeka resmi ditetapkan sebagai kurikulum nasional diberlakukan di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2024/2025.

12) Kurikulum Nasional

Tahun 2024 menjadi momen penting dalam dunia pendidikan Indonesia dengan dikeluarkannya Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024. Dengan dikeluarkannya

Permendikbudristek tersebut kurikulum Merdeka resmi digunakan sebagai kurikulum yang berlaku secara nasional. Pada pasal 31 Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024, semua satuan pendidikan dari tingkat pendidikan usia dini, hingga satuan pendidikan menengah yang belum menerapkan kurikulum Merdeka dapat mengikuti Kurikulum 2013 hingga tahun pelajaran 2025/2026. Kemudian Satuan Pendidikan tersebut diwajibkan beralih ke Kurikulum Merdeka paling lambat pada tahun pelajaran 2026/2027. Melalui peraturan tersebut, terjadi sejumlah pembaharuan signifikan dalam struktur kurikulum untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan lainnya.

Beberapa point penting dalam pembaharuan tersebut, diantaranya:

a. Percepatan dan Pendalaman Pembelajaran

Murid-murid dengan potensi kecerdasan istimewa diberikan kesempatan untuk memperdalam atau mempercepat penguasaan Capaian Pembelajaran Kurikulum Merdeka secara individu, di luar rombongan belajar.

b. Penambahan Mata Pelajaran

Terjadi penambahan mata pelajaran yang dinantikan di tingkat Sekolah Dasar, menandakan komitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di SD.

c. Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib

Bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib di SD mulai dari kelas 3 dengan masa transisi hingga tahun ajaran 2027/2028. Keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris sejak dini. Permendikbudristek Pasal 33 menyatakan bahwa Mapel Bahasa Inggris akan menjadi mapel pilihan SD/MI atau sekolah setara lainnya hingga tahun ajaran 2026/2027. Namun, pada tahun ajaran 2027/2028 Bahasa Inggris akan menjadi mata Pelajaran wajib bagi murid-murid mulai kelas 3 SD.

d. Penambahan Mata Pelajaran Pilihan di SMA

Di jenjang SMA, terjadi penambahan mata pelajaran pilihan seperti di Sejarah Tingkat Lanjut.

Selain itu, ada fleksibilitas dalam pengalokasian waktu pembelajaran untuk mata Pelajaran pilihan lain yang sesuai dengan bakat dan minat siswa.

e. Pembaharuan di Jenjang SMK

Pengaturan jumlah minggu efektif. Jumlah minggu efektif pada kelas XII dan XIII diasumsikan setara dengan 32 minggu untuk program 3 tahun 10 bulan, atau 26 minggu untuk program 4 tahun pembaharuan di jenjang Pendidikan Khusus dan kesetaraan.

f. Ketentuan Umum yang Mengalami Pembaharuan

Penetapan Kurikulum Satuan Pendidikan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan, memberikan lebih banyak otonomi kepada sekolah.

g. Ekstrakurikuler

Ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan sumber daya dan peserta didik mengikutiekstrakurikuler. secara suka rela.

h. Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Satuan Pendidikan memiliki tanggung jawab untuk

mengembangkan,menetapkan, dan merefleksikan kurikulum, serta menyediakan layanan sesuai dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus.

Pembaharuan ini menandai langkah besar dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Diharapkan, implementasi dari pembaharuan kurikulum ini dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi kemajuan pendidikan bangsa.

Perbandingan Kurikulum Indonesia dan Jepang

Indonesia	Jepang
Penerapan kurikulum di Indonesia pada umumnya berakar pada kurikulum nasional, namun setiap daerah hanya diperbolehkan mendesain muatan lokal yang disesuaikan dengan daerahnya	Penerapan kurikulum di Jepang pada umumnya berakar pada kurikulum nasional, namun setiap sekolah diperbolehkan untuk mendesain kurikulum agar sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerahnya sendiri.
Siswa harus mempunyai keterampilan dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif, inovatif, serta terampil dalam	Siswa ditekankan untuk dapat dengan mandiri mengenali nilai baik dirinya sendiri dan menghargai nilai yang dimiliki oleh orang lain, hal ini

berkomunikasi dan berkolaborasi. (Kumer)	diyakini dapat menumbuhkan siswa sebagai bagian penting masyarakat yang membangun lingkungan masyarakat yang berkelanjutan. (Nilai Ikiru Chikara)
Pembelajaran yang integratif belum mengedepankan pada aktivitas pemecahan masalah secara maksimal.	Pembelajaran yang integratif yang mengedepankan pada aktivitas pemecahan masalah
Dalam Kurikulum Merdeka (Kumer) ini tidak membatasi konsep pembelajaran yang berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah dan juga menuntut kekreatifan terhadap guru maupun peserta didik.	Selain melalui aktivitas pembelajaran, kurikulum di Jepang juga menekankan siswa untuk aktif dalam kegiatan diluar pembelajaran. Seperti aktivitas Student Council, ekstrakurikuler, dan aktivitas di masyarakat. Aktivitas Student Council sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan sendiri oleh siswa dimana ketua kegiatan pada umumnya adalah berasal dari siswa sendiri dan guru bertugas untuk membina.

Sistem Pendidikan di Jepang

Sekolah sebagai pendidikan formal pertama di Jepang , kedua pendidikan yang berbasis moral yang berasal dari sistem pendidikan di rumah, ketiga pendidikan yang muncul dari masyarakat itu sendiri yang disebut pendidikan seumur hidup/lomg life leaner (Sahban and SE 2018). Wajib belajar di Jepang dimulai pada umur 6 – 15 tahun. Setiap keluarga yang memiliki anak pada rentang umur 6 – 15 tahun akan diberikan pemberitahuan untuk menyekolahkan anak-anak di sekolah (Fittryati, 2020).

Sistem Pendidikan Jepang terdiri dari enam tahun Pendidikan dasar (Primary Education) dan enam tahun Pendidikan menengah (secondary Education). Pendidikan menengah di jepang dibagi menjadi tiga tahun Pendidikan menengah bawah dan tiga tahun Pendidikan bawah. Karena negara Jepang memiliki program wajib belajar Sembilan tahun, maka Pendidikan wajib di Jepang adalah enam tahun Pendidikan dasar dan tiga tahun Pendidikan menengah bawah.

Setelah mengenyam Pendidikan Menengah bawah, siswa di Jepang memiliki pilihan untuk melanjutkan ke Pendidikan menengah atas (high

school) selama tiga tahun atau belajar di Sekolah tinggi kejuruan atau diploma. Siswa yang lulus high school dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus, Jepang memiliki special Needs Education.

Sekolah negeri di Jepang disebut koritsu gakko. Sekolah ini diselenggarakan oleh pemerintah kota atau yang disebut prefektur. Namun, ada beberapa sekolah yang dikelola oleh prefektur dan pemerintah pusat. Untuk sekolah swasta disebut shiritsu gakko yang diselenggarakan oleh badan hukum (Novi Handayani, 2017).

Sekolah negeri siswa mulai masuk di hari Senin sampai hari Jum`at, sedangkan sekolah swasta sampai Sabtu. Di Sekolah Jepang, biasanya dalam setahun ajaran dibagi menjadi 3 caturwulan dan dibagi 3 musim, yaitu musim gugur/fall, musim salju/ snow dan musim panas/ summer yang waktunya cenderung lama dan panjang. Jepang memulai pembelajarannya pada bulan April dan berakhir di bulan Maret pada tahun berikutnya. Hampir semua Sekolah di Jepang menerapkan sistem tiga semester. Semester satu pada bulan April sampai bulan Agustus, Semester dua pada bulan

September sampai Bulan Desember, dan semester tiga dari bulan Januari hingga bulan Maret.

Sistem pembelajaran di Jepang pada umumnya berlangsung lima hari dalam satu minggu yaitu mulai hari Senin hingga hari Jumat. Meskipun demikian ada juga sekolah di Jepang yang tetap belajar di hari Sabtu. Setelah selesai sekolah, siswa mendapatkan giliran untuk membersihkan kelas kemudian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang disebut Students Clubs.

Selain itu, di Jepang ada pendidikan taman kanak-kanak yang biasa disebut Youchien dan Hoikuen. Perbedaan antara Youchien dan Hoikuen adalah pada jam masuk sekolah. Bila Youchien jam masuk pukul 08.50 – 13.30, sedangkan Hoikuen masuk pukul 07.00 – 19.00 waktu lebih lama dan panjang. Hoikuen diperuntukkan untuk anak-anak yang orang tuanya bekerja. Dan anak-anak yang dimasukkan ke hoikuen harus ada surat keterangan bahwa kedua orang tuanya bekerja (Muzaki, 2020). Hoikuen disebut juga Nursery School atau Day Care. Biasanya, PAUD ini diperuntukkan bagi ibu yang bekerja. Hal ini dikarenakan, para ibu bekerja bisa menitipkan anaknya dari usia 6 bulan

hingga 6 tahun (tergantung peraturan setiap Hoikuen di setiap kota). Di Hoikuen, orang tua tidak perlu menyediakan bekal makan siang, karena pihak sekolah yang menyediakannya. Secara kademis, di Hoikuen rata-rata anak lebih diajarkan tentang fun activity seperti prakarya, olah raga, mendongeng, musik, dan sebagainya. Sehingga dalam hal pelajaran akan dirasa kurang dari Youchien. Hoikuen tidak mempunyai seragam khusus dan tidak ada target akademis yang harus dicapai anak. Adapun tujuan dari Hoikuen ini adalah untuk membantu tumbuh kembang anak, baik secara fisik ataupun mental. Karena ibu yang bekerja tentu akan mempunyai waktu yang lebih sedikit dari ibu rumah tangga, sehingga di sinilah tempat yang terpercaya bagi para ibu yang bekerja untuk menitipkan anaknya. Oleh karena itu, hampir semua Hoikuen bekerja sama dengan dokter, suster, dan ahli nutrisi.

Youchien disebut juga Kindergarten atau Taman Kanak-Kanak. PAUD ini lebih dikhususkan untuk tujuan edukasi. Sehingga Youchien mempunyai lebih banyak pelajaran dibandingkan dengan Hoikuen. Anak-anak yang bersekolah di Youchien pun diharuskan

membawa bekal makan siang (tergantung sekolah Youchien karena ada yang menyediakan bekal makan siang dari sekolah). Di Youchien belajar seperti matematika, PE, menulis, membaca, dan pelajaran lainnya. Dan anak-anak diharuskan memakai seragam sekolah. Anak-anak boleh masuk Youchien setelah melewati ulang tahun ke-3. Biasanya, setelah seorang anak berulan tahun ke-3, dia dapat masuk ke kelas pra TK. Satu tahun kemudian, dia baru akan ke kelas paling muda di TK (Nenshou). Di Youchien tidak terdapat tidur siang seperti Hoikuen.

Sistem pembelajaran di Jepang pada jenjang sekolah menengah atas memiliki tiga program. Yang pertama adalah program standar (Standart Courses) dimana siswa dapat mempelajari dasar dari berbagai topik yang dipelajari. Standar courses ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa untuk belajar ke perguruan tinggi. Yang kedua adalah Vocational Courses. Pada program ini, siswa akan mempelajari keterampilan-keterampilan khusus seperti pertanian, industri, perdagangan, perikanan, keperawatan, dan lain sebagainya. Siswa yang mengambil program ini akan memiliki keahlian khusus sesuai dengan pilihan mereka.

Yang ketiga adalah comprehensive courses, yang menggabungkan standart courses dan vocational courses. Pada program ini siswa diberikan kesempatan untuk membuat jadwal/timetable yang sesuai dengan minat atau jalan yang akan dipilih di masa depan.

Kehidupan pelajar Jepang tidak hanya sibuk belajar pelajaran. Di sekolah mereka juga diajarkan keterampilan hidup atau life skills. Banyak sekolah di Jepang tidak memiliki OB atau Janitors untuk membersihkan kelas. Siapa yang membersihkan kelas? Setiap siswa memiliki kewajiban membersihkan kelas mereka. Mereka akan dibagi dalam beberapa kelompok untuk piket membersihkan kelas setiap harinya setelah pelajaran berakhir dan sebelum kegiatan ekstra kurikuler dimulai.

Begitupun saat kegiatan makan siang. Siswa-siswa juga akan dibagi ke dalam kelompok yang bertugas untuk menyiapkan makan bagi teman-temannya. Hal ini bukanlah hal yang luar biasa. Orang tua tidak ada yang keberatan dengan kegiatan ini karena selain mengajarkan kemandirian, hal ini juga mengajarkan tanggung jawab pada siswa.

Sistem Pendidikan di Indonesia

Sistem pendidikan di Negara Indonesia saat ini yaitu sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan di Indonesia juga berorientasi pada nilai, sejak sekolah dasar peserta didik diberi pengajaran tentang kejujuran, kedisiplinan, dan rasa tanggung rasa. Selain itu, sistem pendidikan Indonesia juga pendidikan terbuka, yang maksudnya adalah siswa diminta untuk saling berkompetensi, mengembangkan kreativitas yang dimiliki seluas-luasnya serta melakukan sesuatu yang lebih inovatif (Zarman, 2017). Sistem pendidikan di Indonesia ada yang formal dan non formal. Sistem pendidikan di Indonesia juga disesuaikan dengan perubahan zaman, pendidikan di Indonesia sebaiknya mengikuti perubahan era dan perubahan yang lebih inovatif dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu kurikulum di Indonesia sering berubah-ubah dikarenakan zaman yang berubah, seperti saat ini Indonesia sudah menggunakan K 13 (Sudarsana, 2016). Dan di tahun 2022 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim tepatnya pada tgl 11

Februari 2022 meluncurkan Kurikulum Merdeka secara daring. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang jauh lebih ringkas, sederhana, fleksibel untuk bisa mendukung *learning loss recovery* akibat pandemi Covid-19.

Jenjang pendidikan yang ada di Indonesia dimulai dari jenjang yang paling awal yaitu PAUD, pendidikan PAUD ini diperuntukkan untuk anak-anak lebih mengembangkan, menumbuhkan baik dari segi jasmani dan rohani anak. Setelah PAUD akan dilanjutkan dengan pendidikan dasar ini jenjangnya dari kelas satu hingga kelas enam, selama enam tahun dan dilanjutkan dengan pendidikan sekolah menengah pertama selama tiga tahun. Kemudian, dilanjutkan dengan sekolah pendidikan menengah ini dikenal atau disebut SMA selama tiga tahun. Dan pendidikan yang lebih tinggi lagi ada D3, S1, S2, S3, dan spesialis (Suryaningrum, Ingarianti et al. 2016). Sementara itu waktu sekolah di Indonesia umumnya dimulai dari pukul 07.00 – 11.30 WIB (d disesuaikan dengan waktu wilayah di Indonesia dan sekolah).

Perbandingan Sistem Pendidikan yang ada di Negara Jepang dan di Negara Indonesia

Perbandingan sistem pendidikan di Jepang dan di Indonesia (Kurniawan, 2017):

1) Jam sekolah

Jam sekolah di Jepang dimulai dari pukul 08.00 – 15.00, dan di Indonesia dimulai dari pukul 07.15 – 15.15, di Indonesia lebih lama satu jam. Di Jepang, apabila ada siswa yang datang terlambat maka akan dimintakan surat perjanjian untuk tidak mengulanginya lagi. Sedangkan di Indonesia siswa diberi hukuman seperti berdiri di tiang bendera, mencabut rumput, dan lain-lain.

2) Etika dan Kedisiplinan

Murid atau siswa di Jepang baru mengikuti ujian mata pelajaran ketika sudah berada di *grade* empat atau setara dengan anak yang berumur 10 tahun, dikarenakan pada usia tiga tahun awal anak-anak diberikan pemahaman yang penting berkaitan dengan tata cara berperilaku sehari-hari serta nilai sopan santun. Di Indonesia kedisiplinan masih harus ditingkatkan lagi begitu juga

etika yang mengalami kemerosotan, bahkan di Indonesia sangat sulit bagi anak untuk mengantri ketika berbelanja.

3) Bidang Studi Pelajaran yang ada di Sekolah

Bidang studi yang dipelajari di sekolah yang ada di Jepang lebih sedikit dibanding dengan mata pelajaran yang ada di Indonesia, sehingga siswa bisa lebih fokus.

4) Transportasi

Murid di Jepang lebih disarankan untuk berjalan kaki ke sekolah, menggunakan sepeda atau menggunakan sarana transportasi umum. Di Indonesia banyak siswa ke sekolah membawa motor dan mobil. Di Jepang anak-anak berjalan kaki atau mengendarai sepeda agar lebih sehat dan bersemangat pergi ke sekolah.

Perlengkapan Sekolah

Di sekolah anak-anak Jepang apabila memasuki kelas menggunakan sepatu khusus di sekolah agar kotoran tidak masuk ke

dalam lantai sekolah, siswa juga menggunakan tas yang diberikan dari pihak sekolah (Surur, M., 2020). Di Indonesia anak-anak menggunakan barang-barang mewah untuk pergi ke sekolah dan itu memperlihatkan kelas anak-anak mana yang kaya dan kurang.

5) Menu Makan Siang

Siswa di Jepang setiap makan siang selalu memakan makanan yang sama dan juga minum-minuman yang sama bersama dengan gurunya di dalam kelas. Di Indonesia siswa makan- makanan yang disukainya sesuai dengan seleranya, di Indonesia anak-anak bisa dengan bebas apakah ingin membawa makanan dari rumah atau jajanan sekolah.

6) Kebersihan Sekolah

Di Jepang siswa setiap pulang sekolah jam 3 sore anak-anak bergotong-royong untuk membersihkan lingkungan sekolah yang disebut dengan O-Soji, tidak ada petugas sekolah yang bertugas untuk membersihkan lingkungan sekolah. Di Indonesia anak-

anak membersihkan sekolah di pagi hari sebelum masuk ke kelas.

7) Seragam Sekolah

Siswi di Jepang menggunakan pakaian seperti baju pelaut dan laki-lakinya menggunakan seragam seperti militer, bajunya tebal dan lengan panjang. Di Indonesia memiliki baju seragam yang berbeda-beda seperti merah putih, batik, dan pramuka.

Perbandingan Kelebihan dan Kekurangan Pendidikan di Negara Jepang dan di Negara Indonesia

Kelebihan sistem pendidikan di Jepang terkenal dengan orang yang pekerja keras, disiplin, dan antre. Semua karakter baik itu terbentuk dari sistem pendidikannya di sekolah.

- 1) Pendidikan tentang etika dan moral lebih diutamakan di Jepang daripada ilmu pengetahuan. Sebenarnya kunci utama kesuksesan seseorang

terlihat faktor etika yang baik, maka nanti akan mengikuti penerapan IPTEK secara baik pula.

- 2) Kampus dan sekolah memulai tahun ajaran baru pada musim semi, saat mekarnya bunga sakura. Hal ini yang membuat siswa dan mahasiswa senang mengikuti pembelajaran. Memang harus ditanam rasa suka dan senang belajar agar tidak jenuh dalam menerima pelajaran.
- 3) Tidak ada office boy, siswa sendiri yang mengerjakan kebersihan kelas dan sekolah. Hal ini untuk melatih siswa dalam bekerja sama, bertanggung jawab dan menjadi pekerja keras.
- 4) Tingkat kehadiran siswa di sekolah Jepang adalah 99%, jadi mahasiswa yang tidak hadir hanya 1%. Berbeda dengan di Indonesia masih banyak budaya titip absen (TA) hanya alasan yang tidak

baik, misal terlambat karena bangun kesiangan, menonton konser, dan lainnya.

- 5) Pendidikan tentang seni sangat diterapkan pada siswa Jepang, agar mereka mencintai budaya tradisional negara sendiri. Hal ini patut dicontoh oleh Indonesia agar generasinya tidak mudah mengikuti arus globalisasi dan life sytle westren (gaya hidup barat).
- 6) Sangat jarang siswa tidak naik kelas. Hal ini dikarenakan siswa sangat antusias melakukan kegiatan positif seperti ekstrakurikuler, workshop saat liburan dan les private. Berbeda dengan siswa Indonesia yang lebih banyak memilih liburan ke tempat hiburan daripada mengembangkan diri.
- 7) Menciptakan kenyamanan dan kedekatann antara siswa dengan guru melalui makan bersama

di kelas saat jam istirahat. Hal ini manjadi salah satu cara untuk menghilangkan sekat antara siswa dan guru, maka sperti orang tua dan anak bahkan sahabat.

- 8) Tidak terdapat kesenjangan sosial antara siswa kaya dan siswa miskin.

Kelemahan dan Permasalahan Sistem Pendidikan di Jepang yang ada diantaranya:

- 1) Kurangnya persaingan antar penyedia edukasi. Siswa tentu memiliki karakter yang berbeda, karena itulah secara teori, edukasi pun beragam dan kompetitif. Sayangnya, tak ada hal semacam itu di Jepang. Keragaman buku cetak dan material lainnya terbatas, belum lagi, pengembangan material dan metode edukasi baru Jepang yang jauh dari yang diharapkan.
- 2) Perang ujian masuk
Kini, masalah utama yang dihadapi para siswa SMP di Jepang adalah kecemasan yang berhubungan dengan

ujian masuk SMA. Kebanyakan dari mereka belajar dari beberapa tempat les sekaligus. Tak hanya itu, anak-anak yang lebih muda pun terpengaruh dengan ujian masuk tersebut. Sedikit abnormal kah jika seseorang siswa SD baru sampai rumah pada pukul `10 malam setelah mengikuti les? Sebuah survei juga menunjukkan bahwa 27% dari siswa SD dan 46% siswa SMP Jepang merasa kelelahan akibat keseharian mereka. Ya perang ujian masuk ini mencegah anak-anak tumbuh dengan” baik,”membuat masa depan mereka bisa suram.

3) Resiko Pengaturan Edukasi Nasional

Karena badan pemerintah yang memutuskan konten edukasi, jika badan tersebut berbuat salah, seluruh sekolah akan kena getahnya. Resiko ini dapat dihindari jika kebijakan membuat konten edukasi dapat ditransfer ke pemerintah lokal atau sekolah swasta dan sebuah sistem edukasi baru dapat dicoba secara lokal lalu disebarakan sebelum

Kementerian Pendidikan membuat keputusan nasional.

4) Sistem pendidikan Jepang menolak adanya perbedaan Siswa yang memiliki hasil lebih baik dalam bidang akademis biasanya dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan cepat di AS, karena absennya kurikulum nasional membuatnya memungkinkan. Jepang memiliki sistem edukasi yang diatur oleh kurikulum nasional dan jika seorang siswa diizinkan untuk naik ke tingkat lebih tinggi dengan durasi lebih cepat, dapat dianggap sebagai diskriminasi.

5) Kontradiksi system pendidikan Kementerian pendidikan Jepang memutuskan kontek edukasi. Artinya, segala sistem edukasi yang tidak disetujui oleh kementerian, tak berguna. Dalam sistem pendidikan Jepang kini, hanya melakukan apa yang disetujui kementerian dan menghindari sistem lain adalah cara terbaik untuk memasuki universitas terkenal. Aktivitas relawan dan komunitas, home education, dan berbagai cara lain tak

berguna. Inilah kontradiksi terbesar dalam sistem pendidikan di Jepang. Di AS, definisi edukasi lebih luas karena pemerintah pusat tak menemukan konten edukasi. Pengalaman di dunia nyata seperti part-time dan aktivitas sosial untuk masuk ke dalam ranah edukasi di AS. Siswa SMA di Jepang banyak yang tak dibenarkan untuk mengambilnya. Hasilnya, definisi edukasi berbeda.

- 6) Edukasi mengganggu kebebasan edukasi dan berpikir
- Deskripsi dan interpretasi dalam buku sejarah Jepang masih menjadi perdebatan. Hal ini termasuk argument terkait kependudukan militer Jepang di negara-negara Asia yang tertulis sebagai bakti sosial pada negara lain, bukan invasi militer sebagaimana kenyataannya. Namun, hingga kini tak tafsir sejarah yang meluruskan hal tersebut. Kini ada sekitar 1.200 juta warga Jepang yang harus hidup dalam pandangan sejarah yang sama akibat hal tersebut. Saat ini, sekolah-sekolah Jepang

mengajarkan pandangan sejarah terpadu. Namun, sistem ini dapat mengganggu kebebasan pendidikan dan kepercayaan bagi sayap kanan maupun kiri. Pendidikan Jepang juga harus didemokratisasikan dalam hal ini.

- 7) Sistem di Jepang tidak mengembangkan inkonvensionalitas atau kreativitas
- Baru-baru ini, negara-negara Asia mulai mengejar Jepang. Karena produk Asia yang lebih murah sering kali lebih disukai daripada produk Jepang yang lebih mahal meski kualitas sama, industri Jepang harus semakin tergantung pada kreativitas dan bersikap tidak konvensional.
- 8) Diskriminasi sosial baru dibidang pendidikan
- Tidak ada yang menyangkal fakta bahwa diplomatisme Jepang menghasilkan diskriminasi sosial baru di sekolah. Tidak ada gunanya mencoba menyelesaikan masalah bullying dan penolakan sekolah kecuali beberapa langkah diambil

untuk membongkar struktur diplomatisme.

Kelebihan sistem pendidikan di Indonesia

1) Biaya pendidikan terjangkau

Peserta didik tidak perlu menghabiskan banyak biaya untuk pembayaran fasilitas pendidikan. Negara sudah menanggung biaya pendidikan. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) sudah mengalokasikan alokasi dana pendidikan sebesar 20%. Sehingga ada sumber biaya pendidikan sekolah yang disebut Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang tidak membolehkan sekolah untuk biaya iuran dari orang tua peserta didik. Jika dana itu kurang, hanya komite sekolah yang berhak meminta kekurangan biaya pada orang tua peserta didik.

2) Sistem yang Transparan

Dalam pendidikan di Indonesia sekarang, sistem dijalankan secara transparan. Dengan begitu, wali murid dapat mengawasi proses pembelajaran dengan mudah dan jelas.

3) Kurikulum disusun oleh orang-orang yang ahli dan berpengalaman

Dahulu, kurikulum hanya disusun oleh para ahli. Namun, sejak adanya kurikulum 2013, guru sebagai praktisi juga bisa terlibat dalam penyusunan kurikulum. Terlebih, guru adalah orang yang langsung berada di lapangan sehingga mengetahui materi-materi yang dibutuhkan dan menggali bakat dari peserta didik.

4) Pertimbangan penerimaan siswa lebih mudah

Pemerintah di masa ini sedang menggalakkan pengurangan kesenjangan anatar daerah. Tidak ada lagi istilah “daerah terpencil”. Pemerintah pusat dan daerah akan memfasilitasi tiap sekolah. Terlebih adanya sistem zonasi saat

ini, membuat semua sekolah negeri mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Tidak ada lagi yang dijuluki sebagai “sekolah favorit”. Dahulu, siswa beramai-ramai mendaftar ke sekolah-sekolah yang dianggap unggul di tengah masyarakat. Namun, dengan sistem zonasi yang baru beberapa tahun terakhir diterapkan, penerimaan peserta didik baru hanya mempertimbangkan daerah dan umur. Dengan sistem penerimaan ini, seluruh peserta didik yang mendaftar bisa menuntut ilmu dekat dengan domisili mereka.

Kelemahan Sistem Pendidikan di Indonesia

Sistem pendidikan di Indonesia memiliki beberapa kelemahan dan permasalahan diantaranya:

1) Sarana pendidikan yang kurang merata
Ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang merata. Ini dibuktikan adanya kesenjangan yang cukup besar antara sarana dan prasarana yang ada di kota dengan di daerah yang terpencil.

Masih banyak daerah terpencil yang belum terjamah oleh sarana pendidikan. Para guru dan siswa kekurangan peralatan dan tempat yang kurang memadai. Selain itu, perpustakaan juga masih belum menyebar ke banyak daerah.

2) Tenaga pendidik yang belum merata

Bukan jumlah guru yang menjadi permasalahan, tetapi penyebaran yang belum merata. Hal ini dibuktikan dari tenaga pendidik yang ada di daerah perkotaan yang banyak, Sementara itu, daerah-daerah yang masih “tertinggal” kekurangan guru yang berkualitas, sehingga daerah tersebut tidak mendapat pengajaran yang maksimal akibat kurangnya tenaga pendidik.

3) Kurikulum yang bersifat teoritis
Sejak awal, kurikulum di Indonesia masih mengandalkan teori-teori saja. Ketika pelajar sudah menyelesaikan pendidikan, mereka kekuarangan skill sesuai tuntutan lapangan pekerjaan yang ada. Hal ini

dikarenakan masih banyak sekolah yang jarang mengadakan praktik kerja atau membekali siswa dengan soft skill dan hard skill. Pembekalan soft skill dan hard skill bagi peserta didik penting untuk menunjang lulusan yang berkualitas, sehingga memberi kontribusi yang nyata bagi Bangsa Indonesia. Presentasi antara teori dan praktik dalam dunia pendidikan sebaiknya 50:50 supaya ilmu yang didapatkan peserta didik menjangkau di berbagai dimensi pengetahuan sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berprestasi dan berkompeten untuk menghadapi tantangan global.

- 4) Penyelewengan dana pendidikan yang masih terjadi Penyelewengan dana pendidikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menjadi salah satu jawaban mengapa pendidikan di Indonesia belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal tersebut dapat dibuktikan pada alokasi dana untuk pendidikan dari APBN (Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar 20% namun hal ini masih kontras dengan progres pendidikan di Indonesia yang masih belum maksimal. Penyelewengan dana ini membuat pembangunan sarana dan prasarana belum maksimal, sehingga perlu adanya transparansi rincian penggunaan anggaran dan penerapan hukuman berat bagi oknum yang menyelewengan dana-dana yang digunakan untuk keperluan pendidikan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kurikulum di Jepang dan di Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan, di mana banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya faktor sejarah, budaya, dan kebijakan pemerintah. Kurikulum di Jepang memiliki karakteristik pengembangan yang berusaha menyesuaikan kondisi dan pemikiran masyarakat Jepang. Perubahan tersebut juga mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia internasional. Perubahan kurikulum di fase awal pasca perang dunia kedua berlangsung dalam waktu singkat,

sementara perubahan selanjutnya berlangsung 10 tahunan. Penyusunan kurikulum telah diselesaikan tiga tahun sebelum dipublikasikan kepada khalayak untuk mendapatkan masukan, dan selanjutnya diterapkan secara bertahap di sekolah. Selain itu, kurikulum di Jepang terstruktur dengan baik dan berfokus pengembangan karakter serta keterampilan praktis telah terbukti dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Di lain pihak Indonesia harus banyak belajar untuk memperbaiki dan menyesuaikan kurikulum agar bisa memenuhi standar global, meskipun dalam penerapannya masih menemui kendala dan tantangan dalam meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan. Dan sangat penting bagi kedua negara untuk terus melakukan belajar, berinovasi, dan beradaptasi dengan melihat keunikan dari masing-masing guna meningkatkan tujuan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Sehingga dari perbandingan dan praktik baik pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan masing-masing negara guna kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Harapan kita

semua bahwa kurikulum yang baru tidak akan mengalami nasib yang sama dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Akan tetapi mampu memberikan pencerahan terhadap perubahan paradigma berpikir para pelaksana di lapangan, serta mampu memfasilitasi dan membantu meningkatkan kompetensi peserta didik sehingga mampu bersaing baik di kancah nasional maupun internasional dengan bangsa-bangsa yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Awan, C. (2017). *Wawasan Pendidikan: Studi Komparatif Sistem Pendidikan Di Beberapa Negara Maju (Korea Selatan Dan Jepang)*.
- Afriliani, M. (2021). *Sistem Pendidikan Negara Indonesia yang Tertinggal dari Negara Korea Selatan dan Perbandingan Sitem Pendidikannya*. 5, 1534–1543.
- Analisis Perbandingan Kurikulum Pendidikan Korea Selatan dan Indonesia, Hawa Rani Sukma, Achmad Hufad, Eko Sulistiono 12754
- Connie Chairunnisa, C., I. Istayatiningtias, et al. (2019). *Pengembangan Model Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Pertama*. Mitra Wacana Media.

- Fittryati, S. A. (2020). Perancangan sekolah pendidikan anak usia dini (paud) di Sidoarjo dengan pendekatan arsitektur ramah anak menurut permendikbud no. 137 tahun 2014, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hanggoro, D. (2022). Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia dan Sistem Pendidikan Jepang : Memajukan Pendidikan Bangsa. *Jurnal Exponential*, 3(2), 363–373.
- Harefa, D., Telaumbanua, T. (2020). Belajar Berpikir dan Bertindak Secara Praktis Dalam Dunia Pendidikan kajian untuk Akademis. CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Harefa, D. (2020). Perkembangan Belajar Sains Dalam Model Pembelajaran. CV. Kekata Group.
- Iyam Maryati, Yenny Suzana, Darmawan Harefa, I. T. M. (2022). Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis dalam Materi Aljabar Linier. *PRISMA*, 11(1), 210–220.
- <http://proceedings.ideaspublishing.co.id/index.php/hardiknas/article/view/8文部科学>
- 省/mextchannel. (2019). December 25. Japanese-style education from the viewpoint of teachers [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=2QazQyNhDdg>
- Johan, T. S. B. (2018). Perkembangan Ilmu Negara dalam Peradaban Globalisasi Dunia. Deepublish. *Jurnal Pendidikan Dan Humaniora*, 6(1). <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/NDURMI>
- Hanggoro, D. (2022). Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia dan Sistem Pendidikan Jepang : Memajukan Pendidikan Bangsa. *Jurnal Exponential*, 3(2), 363–373.
- KurniBray, M., Adamson, B., & Mason, M. (2014). *Comparative Education Research: Approaches and Methods: Second Edition*. In *Comparative Education Research: Approaches and Methods: Second Edition*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-05594-7>
- Kitamura, Y., Omomo, T., Katsuno, M. (2019). Analysis, C., & Reforms, E. (n.d.). *Education in Japan*.
- Manalu, J. B., Sitohang, P., Heriwati, N., & Turnip, H. (2022). *Prosiding Pendidikan Dasar Pengembangan Perangkat Pembelajaran Kurikulum Merdeka Belajar*. Mahesa Centre
- Melati, E. R., & Utanto, Y. (2016). Kendala Guru Sekolah Dasar dalam Memahami Kurikulum 2013. *Indonesian Journal of Curriculum and Educational Technology Studies*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.15294/ijcets.v4i1.14252>

- MEXT. (2019). Overview of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology.1–32.
https://www.mext.go.jp/en/about/pablication/csFiles/afieldfile/2019/03/13/1374478_001.
- Muzaki, A. (2020). Implementasi Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah Di Lembaga Pendidikan Formal NU (Studi Kasus di SMK Ma'arif 2 Sleman).
<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/view/7085/6067>
- Ministry of Education Culture Sports Science and Technology. (2018). Basic Education in Japan – chi-toku-tai-
<https://www.mext.go.jp/en/Policy/Education/Brochure/Title01/DetailsFiles/Afieldfile/2018/10/09/1409899-01.Pdf> [07 Juni 2021].
- Muhammedi. (2016). Perubahan kurikulum di indonesia : studi kritis tentang upaya menemukan kurikulum pendidikan islam yang ideal. *Raudhah*, IV(1), 49–70.
- NDRUMI: Jurnal Pendidikan dan Humaniora Perbandingan sistem pendidikan indonesia dan jepang. *Ndrumi: Jurnal Pendidikan Dan Humaniora*, 6(1).
<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/NDURMI> Hanggoro, D. (2022). Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia dan Sistem Pendidikan Jepang : Singapura , Belanda, Kanada) Diakui Memiliki Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia dalam Kajian Antropologi dan Matematika.
Prosiding Seminar Nasional Matematika Dan Pendidikan Matematika, 219–229.
- Pardomuan M J N Pardomuan. (2013). Kurikulum 2013 , Guru , Siswa , Afektif , Psikomotorik , Kognitif. *E-Journal Universitas Negeri Medan*, 6, 17–29.
- Perdana, D. I. (2016). Kurikulum Dan Pendidikan Di Indonesia Proses Mencari Arah Pendidikan Yang Ideal Di Indonesia atau Hegemoni Kepentingan Penguasa Semata? *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 2(1), 63.
<https://doi.org/10.22146/jps.v2i1.23412>
- Putra, A. (2017). Mengkaji dan Membandingkan Kurikulum 7 Negara (Malaysia, Singapura, Cina, Korea, Jepang, Amerika dan Finlandia). *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 1–21.
- Putra, I. E. D., Rusdinal, R., Ananda, A., & Gistituati, N. (2023). Perbandingan Kurikulum Pendidikan Indonesia dan Finlandia. *Journal on Education*, 06(01), 7437–7448.
Research, 1(1), 80–86.
<https://doi.org/10.34007/ppd.v1i1.174>
- Niswah, K. (2023). Komparasi Sistem Pendidikan Jepang Dan Indonesia di Era Kontemporer. 4(4).
- Ritonga, M. (2018). Politik dan Dinamika Kebijakan Perubahan

- Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Hingga Masa Reformasi. *Bina Gogik*, 5(2), 1–15.
- Sudarsana, I. K. (2016). Pemikiran tokoh pendidikan dalam buku lifelong learning: policies, practices, and programs (Perspektif Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia).
- Sulfemi, W. B. (2019). Kompetensi Profesionalisme Guru Indonesia dalam Menghadapi MEA. 179 Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia dan Jepang –Dian Montanesa, Firman, Riska Ahmad DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i1.246>
- Suryaningrum, C., T. M. Ingarianti, et al. (2016). Pengembangan model deteksi dini anak berkebutuhan khusus (ABK) pada tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) di kota Malang. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 4(1): 62-74.
- Saleh, M. (2020). Merdeka Belajar di Tengah Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Hardiknas*, 1, 51–56.
- Sahban, M. A. and M. SE (2018). Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang. *SAH MEDIA*. Soetantyo, S.
- Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Berbagai Negara di Dunia. 1, 37–50.
- Halawa, D. P., Susanti Telaumbanua, M., Buulolo, D., & Matematika, M. P. (2023). .
- Wulandari, D., Ardeni, Hilmin, Noviani, D. (2023). Sistem Pendidikan Korea Selatan Dan Indonesia. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*. 1(1), 17–32.
- Quality With The School Productivity As Moderating Variable. *Psychology and Education Journal*, 57 (9), 1196–1205.